

AHY Dinilai Pilihan Realistis Jadi Cawapres Anies Bawedan

JAKARTA (IM) - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih realistis untuk menjadi cawapres Anies Baswedan ketimbang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Hanta menyebut pasangan Anies-AHY lebih kuat dalam berbagai survei daripada Anies-Khofifah.

"Jika Koalisi Perubahan ingin jalan mulus yang lebih realistis, lebih rasional, dan lebih kuat secara survei sampai saat ini, AHY jadi pilihan," ujar Hanta saat diminta konfirmasi, Kamis (9/3).

Hanta menjelaskan, saat ini simulasi pasangan Anies-AHY lebih tinggi prospeknya secara elektoral ketimbang berpasangan dengan tokoh yang lain. Dia meyakini AHY adalah pilihan yang efektif bagi Anies.

"Rute terpendek dan efektif dalam fase kandi-

dasi (pencalonan) bagi Anies adalah berpasangan AHY ketimbang yang lain," ucapnya.

Hanya, Hanta menyebut nama Khofifah juga potensial untuk maju menjadi cawapres Anies. Sebab, Khofifah bisa membawa basis massa dari Nahdlatul Ulama (NU) hingga masyarakat di Jawa Timur.

"Nama Khofifah Indar Parawansa tidak bisa diabaikan. Selain gubernur di salah satu provinsi besar di Jawa, tentu ada keinginan lain, yakni berharap bisa membawa pemilih NU yang tidak terpisahkan dari konstelasi politik hari ini," tutur Hanta.

Menurutnya, posisi cawapres memang akan menjadi tantangan tersendiri bagi Koalisi Perubahan. Dia menilai Partai Demokrat pasti menginginkan AHY yang menjadi cawapres.

"Tetapi hitung-hitungan politiknya tidak mudah juga karena ketiga partai di Koalisi Perubahan pada saat yang sama juga akan bertarung di pileg," katanya. ■ han

Luhut: Turis Asing yang Nakal Tidak Kami Perlukan di Bali

JAKARTA (IM) - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ikut menanggapi soal maraknya turis asing berulah di Bali. Luhut menegaskan, Bali tidak membutuhkan turis asing yang nakal.

"Jadi, mengenai turis tadi saya sudah bicara dengan Pak Gubernur Bali (Wayan Koster). Turis-turis yang nakal tidak kami perlukan di Bali," kata Luhut usai meninjau TPST Kertalangu, Denpasar, Bali, Kamis (9/3).

Luhut menegaskan turis nakal itu bisa merusak Bali. Luhut meminta agar jangan sampai Pulau Dewata dikotori oleh turis asing yang berperilaku tidak baik.

"Oleh karena itu turis-

turis yang nakal dan dengan penelitian yang cermat oleh polisi maupun aparat terkait, kami akan bisa persona non gratakan (negara berhak untuk menolak atau mengusir) dari sini," terangnya.

Luhut mengatakan bahwa Gubernur Bali memiliki caranya sendiri. Koster disebutkan juga telah melapor kepadanya.

Sementara itu, Koster menegaskan Pemprov Bali akan mengambil tindakan tegas terhadap turis asing nakal. Koster menyebut telah berkoordinasi dengan Kapolda Bali, Kemenkumham, dan jajaran untuk mengidentifikasi berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan WNA di Bali. ■ mei



FOTO: ANT

PEMERIKSAAN RICKY HAM PAGAWAK

Tersangka Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/3). Ricky Ham Pagawak diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah pengerjaan proyek di Mamberamo Tengah selama 2013 hingga 2019 serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mencapai Rp200 miliar.

MA Sunat Vonis Eks Kadis Syariah Islam di Aceh yang Korupsi Nasi Santri

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman mantan Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Husin. Husin dinyatakan terbukti melakukan korupsi anggaran makanan santri lebih dari Rp 3 miliar.

Kasus bermula saat Polres Gayo Lues menyelidiki anggaran di Pemkab Gayo Lues, yaitu dana keperluan 1.000 santri, 45 panita, dan 40 orang narasumber selama 90 hari. Anggaran itu dipakai untuk belanja nasi dengan total anggaran Rp 5,4 miliar, makanan ringan Rp 2,4 miliar, teh/kopi anggaran Rp 1 miliar.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara menunjuk rekanan, yaitu Wisma Pondok Indah dan Ira Katering, untuk memenuhi kebutuhan para santri selama pelatihan.

Pada kenyataannya, mereka memangkas anggaran belanja nasi yang seharusnya di kontrak kerja Rp 19.965 per porsi, tapi membeli dengan harga murah sehingga Rp 9.500 per porsi. Kemudian belanja makanan ringan yang seharusnya sesuai kontrak Rp 8.910 dipotong menjadi 4.500.

Husin juga diduga

menerima keuntungan dari pekerjaan belanja makanan dan minuman saat menjabat jadi Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Aceh, ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,7 miliar.

Kasus pun bergulir ke pengadilan. Husin lalu dituntut 7,5 tahun penjara. Pada 25 Februari 2023, Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Husin dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan.

Hukuman itu disunat di tingkat banding menjadi 4,5 tahun penjara pada 25 April 2022. Atas vonis itu, jaks, yang menuntut 7,5 tahun penjara, tidak terima dan mengajukan kasasi. Begitu juga dengan Husin.

"Perbaikan pidana menjadi penjara selama 4 tahun, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan," demikian bunyi putusan MA yang dilansir website-nya, Jumat (10/3).

Duduk sebagai ketua majelis Desnayeti dengan Agustinus Purnomo Hadi dan Soesilo. ■ mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



MENPORA IKUTI SENAM BERSAMA PEGAWAI

Menpora Zainudin Amali (tengah) bersama pejabat dan pegawai Kemenpora mengikuti senam di halaman Kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (10/3). Zainudin Amali masih menjalankan tugas sebagai Menpora usai menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden pada Kamis (9/3) untuk selanjutnya fokus mengurus sepak bola sesuai tugasnya sebagai Wakil Ketua Umum PSSI.

Soal Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu, Wapres: Kalau Mencurigakan, Usut Tuntas

Ma'rif MD sudah menyerahkan laporan dugaan transaksi janggal di Kemenkeu yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp300 triliun.

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'rif Amin menegaskan, bila ditemukan adanya hal mencurigakan dalam transaksi sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, hal itu harus diusut tuntas.

"Saya kira kalau ada hal-hal yang mencurigakan, saya kira terus diusut tuntas," ujar Ma'rif dilansir dari siaran pers resmi Sekretariat Wakil Presiden, Jumat (10/3).

Menurutnya, sudah menjadi tugas aparat yang berwenang untuk mengusut temuan yang memiliki indikasi penyimpangan.

"Jika ada indikasinya, itu memang menjadi kewenangan yang berwenang ya, utamanya dari internal Kementerian Keuangan sendiri, dari Inspektoral Jenderal itu nomor

satu," jelasnya.

"Dan kalau memang nanti berlanjut tentu itu sesuai dengan aturan," kata Ma'rif menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendapatkan laporan adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu. Pergerakan uang tersebut sebagian besar di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan

Bea Cukai, itu yang hari ini," kata Mahfud saat berada di Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (8/3) lalu.

Mahfud sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sudah menyerahkan laporan adanya transaksi janggal di Kemenkeu, di luar kasus Rafael Alun Trisambodo.

"Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, (hanya) ratusan miliar. Sekarang, hari ini, sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 triliun. Itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan ke Ibu Sri Mulyani. PPATK juga sudah menyampaikannya," tegasnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengaku baru menerima surat laporan adanya mencurigakan aliran dana sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai, Kemenkeu.

"Saya terima tadi pagi tapi karena sedang terbang ke sini (Kota Solo). Jadi saya belum lihat suratnya, tapi saya sudah scan," kata Sri

Mulyani setelah mendampingi Presiden Jokowi melakukan peninjauan di KPP Pratama Solo, Kamis (9/3).

Sri Mulyani, menjelaskan dalam lampiran surat berjumlah 36 halaman. Tidak menunjukkan angka Rp 300 triliun tersebut yang sebelumnya, diungkap Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.

"Saya belum melihat angkanya ya, mengenai Rp 300 triliun itu. Terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu, enggak ada angkanya. Jadi saya, dari mana angkanya. Kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan, angkanya dari mana," kata Menkeu.

"Saya akan tanya kepada Pak Ivan, cara menghitungnya gimana, datanya seperti apa karena di dalam surat yang disampaikan ke saya, yang dalam hal ini ada lampirannya 36 halaman enggak ada satu-pun angka. Jadi aku enggak

bisa berkomentar mengenai itu dulu," katanya.

Sri Mulyani juga mengaku akan melakukan koordinasi secara kooperatif untuk mengetahui adanya kecurigaan aliran dana tersebut.

"Untuk bisa meng-clearkan, apa kan sebetulnya ini masalahnya dimana, siapa, dan saya berjanji akan sama Pak Mahmud. Ayo Pak Mahfud, aku dibantu aku senang, kita bersihin," jelasnya.

Secara gamblang, Sri Mulyani juga menegaskan jika benar data itu terbukti dan sesuai fakta yang ada, dirinya akan melakukan penindakan tegas seperti yang dilakukan terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, yang terlibat dalam kasus yang menjeratnya.

"Hukuman disiplin, data-data yang kita miliki kita share juga dengan KPK. Sehingga dari sisi penegakan hukum tetap dilakukan. jadikan ada pembagian tugas ya dari kami ASN dari sisi-sisi penegakan hukum," tegasnya. ■ han

PDIP, PPP dan PBB Terlihat Kian Mantab Berkoalisi di 2024?

JAKARTA (IM) - Sinyal terbentuknya koalisi tiga partai yakni PDIP, PPP, dan PBB, kian menguat jelang Pilpres 2024. Pertemuan elite tiga partai yang sudah berlangsung dan rencana persama-han lanjutan menguatkan isu terbentuknya koalisi PDIP, PPP, dan PBB.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy atau biasa disapa Rommy sempat melontarkan spekulasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bubar. PPP adalah bagian dari KIB bersama-sama dengan Golkar dan PAN.

Rommy membicarakan potensi KIB bubar usai menjadi narasumber Bimtek Anggota DPRD PPP se-Jatim di Surabaya. Rommy menyoroti permasalahan capres-cawapres KIB yang belum juga diputuskan.

"Jadi kemungkinan perubahan (partai masuk atau keluar) di KIB pun masih sangat besar, baik pasangan koalisi parpolnya maupun capres-cawapresnya," kata Rommy, Senin (6/3).

Rommy diketahui sempat melakukan pertemuan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Rommy meng-

ajak diajak berkoalisi oleh Hasto.

"Kemarin Mas Hasto ketemu dengan saya, beliau mengulangi ajakannya kepada PPP untuk bergabung dan berkoalisi dengan PDIP," kata Rommy dalam acara 'Adu Perspektif: Dilema Koalisi, Nasib Pemilu, dan Pengganti Jokowi' yang ditayangkan detikcom, Rabu (8/3).

Rommy mengaku bukan hanya sekali diajak berkoalisi dengan PDIP. Dia mengatakan PDIP dan PPP memiliki sejarah kebersamaan sejak dulu.

"Iya memang meng-

ajak dan bukan baru kali ini, karena Waktu Ketum (PPP) Pak Suharso, Plt, Pak Suharso juga diajak yang sama," kata Rommy.

Berdasarkan sejarah, kata Rommy, PPP dan PDIP memiliki hubungan yang sudah berlangsung lama. Baik dari sejarah pergerakan hingga koalisi di level daerah dan nasional.

"Orang mungkin enggak suka dengan PDIP, tapi wakilnya, nah gitu biarlah yang asosiasinya religiusitas karena bangsa ini dibangun 2 pilar, nasionalisme dan religiusitas," tambahnya.

Menurutnya, bukan suatu hal yang salah jika PPP bergabung dengan PDIP. Namun, saat ini PPP masih menimbang karena PDIP belum meresmikan siapa capresnya dan PPP sudah berada di Koalisi Indonesia Bersatu. Hasto membenarkan pertemuannya dengan Rommy. Hasto menyebut PDIP dan PPP bertetangga.

"Kita kan saling bertemu dengan PPP, apalagi kita tetangga. Tinggal ketok pintu tetangga, kita

bertemu," kata Hasto.

Namun, Hasto mengatakan bahwa pertemuan tak hanya dilakukan dengan PPP. Dia menyebut PDIP juga bertemu dengan partai lain seperti Golkar, PAN yang satu koalisi dalam Koalisi Indonesia Membangun (KIB). "Pertemuan juga dengan Golkar, Gerindra, PAN, PKB kita sering berdialog sehingga tidak ada masalah," ucapnya.

"PDI Perjuangan bekerja sama dengan partai-partai terutama yang memiliki ke-sejarah dalam membangun republik ini," lanjut Hasto.

Di sisi lain, Ketum PBB Yusril Ilha Mahendra akan bertemu dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu, kata Yusril, akan membahas terkait sistem pemilu. "Dengan Bu Megawati (pertemuan) sedang disusun waktunya oleh Pak Hasto," kata Yusril di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).

Yusril mengatakan pertemuan itu penting bagi semua pihak. Selain sistem pemilu, dia menyebut mereka telah sepakat untuk membahas kondisi ketatanegaraan. ■ mei



FOTO: ANT

SILATNAS BADAN ADVOKASI HUKUM PARTAI NASDEM

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) menyerahkan potongan tumpeng kepada Ketua DPP Nasdem Bidang Hukum dan HAM Taufik Basari (kedua kanan) saat Silaturahmi Nasional (Silatnas) Badan Advokasi Hukum (Bahu) Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (10/3). Silatnas tersebut membahas kontribusi Bahu Partai Nasdem dalam mengawal Pemilu 2024.

PENGUMUMAN PT. ASTERISK ENAM

DENGAN INI DIUMUMKAN BAHWA PARA PEMILIK SAHAM DALAM PT. ASTERISK ENAM, SUATU PERSEORAN TERBATAS YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR, AKAN BERALIH KEPEMILIKAN SAHAM NYA SAMPAI 75% (TUJUHPUUH LIMA PERSEN) KEPADA PEMEGANG SAHAM BARU, SEHINGGA PENGAMBILALIHAN SAHAM TERSEBUT MENGAKIBATKAN BERALIHNYA PENGENDALIAN ATAS PT. ASTERISK ENAM. KREDITOR ATAU PIHAK-PIHAK YANG BERKEPERINTANGAN LAINNYA YANG BERKEBERATAN ATAS RENCANA PENGAMBILALIHAN DIMAKSUD DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN SECARA TERTULIS KEPADA PERSEORAN SELAMBAT-LAMBATNYA 14 (EMPATBELAS) HARI SEJAK TANGGAL PENGUMUMAN INI. PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN GUNA MEMENUHI KETENTUAN PASAL 127 UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEORAN TERBATAS. Jakarta, 11 MARET 2023 Direksi PT. ASTERISK ENAM